PERANAN LEGISLATIF DALAM MEKANISME PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JAYA WIJAYA

Johny Lumowa
Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK

Lembaga legislatif sebagai salah satu unsur pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah secara structural menjadi mitra kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun antara pemerintah dan lembaga legislatif masing-masing memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, lembaga legislative diharapkan mampu memiliki peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan berarti bahwa lembaga legislative di daerah memonopoli penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi yang dimaksudkan disini adalah dalam hal implementasi tugas, wewenang, hak dan kewajibannya sebagai lembaga legislate, dan pengawas penyelenggaraan pemerintah seperti yang telah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan peran lembaga legislatif yang dalam hal ini Fewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jaya Wijaya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga legislatif dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal.

Kata Kunci : *Lembaga Legislatif, Pemerintahan Daerah*

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang No. 32 tahun 2004.

Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, sedangkan dekonsentrasi yang dimaksud wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas pembantuan yang dimaksud penugasan dari pemerintah daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu dan selanjutnya peraturan daerah disebut perda adalah peraturan daerah propinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada UU RI No. 32 pasal 2

ayat 3 pemerintah daerah sebagaimana ayat 2 menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pelayanan umum, dan daya saing daerah dan juga pemerintahan daerah propinsi yang terdiri atas DPRD propinsi sedangkan pemerintahan daerah kabupaten terdiri atas DPRD kabupaten/kota.

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rancangan Perda
3. Menetapkan Perda yang telah ditetapkan mendapat persetujuan bersama DPRD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan undang-undang

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintahan di bagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif juga termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan disebut yudikatif.

Bertitik tolak dari dasar hukum UUD No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang salah satu dasar pemikiran dibentuknya Undang-Undang ini yaitu mendorong dan memberdayakan masyarakat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat maka dasar pemikiran yang tercantum dalam Undang-undang tersebut kiranya tercapai.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan yang besar kepada DPRD yang merupakan lembaga

perwakilan masyarakat daerah sebagai wujud pelaksanaan system demokrasi di Indonesia, salah satu fungsi DPRD yang penting adalah fungsi legitimasi yaitu peranan DPRD dalam membangun dan mengusahakan dukungan bagi kebijakan dan keputusan pemerintah daerah agar diterima oleh masyarakat luas.

Dalam hal ini DPRD menjembatani pemerintah daerah dengan rakyat yang mengusahakan kesepakatan maupun dukungan terhadap system politik secara keseluruhan maupun terhadap kebijakan spesifik tertentu DPRD menjadi mitra pemerintah daerah dengan memberikan atau mengusahakan dukungan yang diperlukan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah atau Otsus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Legislatif

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : pertama, membentuk perda yang dibahas dengan kepala

daerah; kedua, membahas tentang menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; keempat, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur/DPRD Kabupaten; kelima, Memilih wakil kepala daerah dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan-jabatan daerah wakil kepala daerah; keenam, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; ketujuh, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh internasional dan pemerintah daerah; ketujuh, meminta laporan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; kedelapan, membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

keseelakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD; kesembilan, emberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Disamping tugas dan wewenang DPRD mempunyai hak nterpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Pelaksanaan hak angket sebagaimana ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna/sidang DPRD yang di hadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Dalam menggunakan hak angket di bentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur, fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat diatur dalam peraturan UU daerah. Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda, mengajukan pernyataan, membela diri, rotokoler, menyampaikan

usul dan pendapat, memilih dan dipilih, imunitas, keuangan dan administrasi. Anggota DPRD mempunyai kewajiban pertama, mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati syarat peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; menjaga norma hubungan dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait; mentaati peraturan tata tertib, kode etik dan sumpah atau janji anggota DPRD.

Menurut UU No. 32 tentang kelengkapan anggota DPRD pasal 46 tentang pemerintah daerah, alat kelengkapan DPRD terdiri atas: pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Anggota badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat 1 Badan kehormatan DPRD dibentuk dan

ditetapkan dengan keputusan DPRD, maka anggota DPRD ketentuan:

1. Untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 orang.
2. Untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) berjumlah 5 (lima) orang untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) orang sampai 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.

Menurut pasal 51 ayat 2 DPRD kabupaten yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 2 komisi yang beranggotakan 4 komisi dan pasal 54 anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Pejabat Negara lainnya
2. Hakim dan badan peradilan
3. Pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, pegawai pada usaha milik Negara, dan usaha milik daerah, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

A. Mekanisme Pemerintahan Daerah

1. Mekanisme/Sistem

Menurut Prof. Pramudji system adalah: suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi, atau himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh dimana didalamnya terdapat komponen-komponen yang ada gilirannya. Merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing saling hubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentudalam rangka mencapai suatu tujuan.

Menurut Prof. Pradjudi ada suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.

Jadi system/mekanisme adalah kesatuan yang utuh suatu rangkaian yang kait mengkait satu sama lain. Sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud hendak dicapai

tidak akan terpenuhi, atau setidaknya tidaknya system yang telah terwujud akan mendapat gangguan.

2. Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dalam kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki obyek, baik obyek material maupun formal, universal sifatnya sistematis secara spesifik (khas).

Pemerintahan berasal dari kata pemerintahan yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung. Kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak pemerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan (rakyat).

Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan antara pemimpin dan bawahan dalam situasi tertentu. Kepemimpinan menguntungkan diri pada sumber-sumber didalam dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan dan diarahkan untuk

mewujudkan keinginan pemimpin, walaupun pada akhirnya juga mengarahkan kepada terarahnya tujuan organisasi/lembaga serta bersifat hubungan personal yang bersifat pada diri pemimpin, bawahan/pengikut dan situasi kondisi.

Dapat ditarik beberapa pokok pikiran menyangkut pengertian kepemimpinan sebagai berikut:

1. Adanya seni, kemampuan dan aktivitas tindakan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin.
2. Adanya upaya untuk mempengaruhi, meningkatkan dan mendorong orang-orang atau bawahan dan juga pengikut.
3. Adanya hubungan pengaruh antara orang-orang bawahan atau pengikut dalam situasi tertentu.
4. Adanya upaya untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian dan pengertian dari para sarjana diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dari seseorang untuk mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi pihak lain untuk mengikuti apa yang diperintah di dasarkan atas dasar kepercayaan pengikut guna mencapai

tujuan yang hendak atau yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan merupakan cermin dari pada sifat pribadi seseorang pemimpin, dari sifat dan tingkah laku serta cara mempengaruhi, menggerakkan orang lain dapat dilihat bagaimana tipe pemimpin dari pemimpin itu.

Selain itu juga diperlukan teknik-teknik kepemimpinan sebagai kemampuan dan keterampilan teknik dari seseorang pemimpin. Dapat pula dikatakan sebagai cara bertindaknya pemimpin dapat dikatakan sebagai peraturan, cara, metode dalam melaksanakan tugas pemimpin/kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memperoleh hasil yang besar-besarnya, teknik kepemimpinan dapat dibagi dua yaitu:

1. Teknik kepemimpinan pokok dapat berupa:
 - a. Teknik pematangan/penyiapan bawahan yaitu memberi keterangan yang jelas dan actual kepada orang-orang sehingga mereka memiliki pengertian yang menyebabkan timbulnya kemauan untuk mengikuti pemimpin dan dilakukan dengan

- cara penerangan dan propaganda.
- b. Teknik human relation adalah suatu proses atau rangkaian proses dalam motivasi orang-orang agar mau bergerak.
 - c. Teknik menjadi teladan yaitu dengan memberikan berbagai contoh-contoh kedisiplinan sehingga orang-orang yang harus digerakkan itu mengikuti apa yang dilihatnya.
2. Teknik kepemimpinan khusus atau yang disebut juga teknik kepemimpinan kerja dapat berupa:
- Teknik persuasi atau ajakan, dilakukan dengan cara lunak dalam bentuk tunjukkan sehingga satu orang lain yang diajakkan suka dan bersedia untuk mengikuti pimpinannya dengan dasar kesadaran dan keinsyafan akan persoalan yang dihadapi.
- Teknik penggunaan system komunikasi yang cocok yaitu dengan mencapai suatu maksud kepada pihak lain baik dalam rangka peperangan persuasi perintah dan sebagainya. Teknik penyediaan fasilitas-fasilitas atau kemudahan, hal ini berguna dapat mengerjakan baik-baiknya perintah atau ajakan

pemimpin seperti fasilitas kecakapan, pemberian uang, fasilitas perlengkapan waktu dan lain-lainnya.

Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat di bentuk legislatif/pemerintahan sebagai unit pemerintah kabupaten berada dalam daerah merupakan wilayah kerja legislatif sebagai perangkat anggota-anggota DPRD kabupaten di bawah kecamatan (Distrik).

Ketua legislatif biasa disingkat DPRD adalah salah satu lembaga untuk mengusulkan dan menetapkan anggaran, membuat PERDA (peraturan daerah) dewan perwakilan rakyat daerah yang berlaku.

Bertitik tolak dari dasar hukum yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tercantum dalam pasal 1,2 ayat 4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pasal 2 ayat 2, 3 pemerintah daerah sebagaimana pada ayat 1 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan.

Iwa Kusuma Sumantri dalam karyanya *Penantar Ilmu Hukum* 1966, beliau menyatakan definisi dari ilmu politik sebagai berikut: ilmu politik ialah ilmu yang memberikan pengetahuan tentang segala sesuatu ke arah usaha penguasa Negara dan alat-alatnya itu untuk melaksanakan hubungan tertentu dengan Negara-negara lain atau rakyatnya; dan juga dalam mendefinisikan ilmu sosial politik lebih memusatkan perhatian pada actor politik itu dan melakukan proses atau tindakan-tindakannya baik dengan rakyatnya maupun organisasi Negara lain.

Menurut Dillon Leidien Stewart, penjelasannya dari definisi yang lebih diutarakan atau diarahkan pada tahap dari manusia sebagai manusia politik yang mengorganisasikan dirinya dalam rangka meraih kesuksesan, kekuasaan dalam bentuk Negara dan pemerintahan sebagai kelembagaan politik yang dapat menaunginya yang mengarah pada pemenuhan nasib sosialnya.

3. *Konsepsi Aparatur Pemerintah*

Dalam bahasa sehari – hari seringkali orang mencampuradukkan penggunaan istilah “pemerintah” dan “pemerintahan”. Seolah – olah keduanya mempunyai arti yang sama.

Pemerintahan menunjuk pada bidang tugas pekerjaan atau fungsi. Sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan, organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan itu. Dapat dikatakan pemerintah menunjuk pada obyek dan istilah pemerintah menunjuk kepada subyek.

Di dalam *Garis Garis Besar Haluan Negara* (1993) jelas ditekankan Arah Pembangunan Jangka Panjang antara lain, yaitu : “Pembangunan aparatur negara termasuk aparatur pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur negara agar dapat lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin, keadilan dan kewibaaan sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat.

Selanjutnya, konsep pembangunan aparatur pemerintah secara jelas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Aparatur negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintah negara yang meliputi abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas

penyelenggaraan negara dan pembangunan, serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai – nilai dan cita – cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

- b. Pembangunan aparatur negara diarahkan pada terwujudnya dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan sistem administrasi negara yang semakin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan yang strategis.

Kebijaksanaan dan langkah pendayagunaan administrasi negara perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan serta ditujukan pada penataan organisasi, penyempurnaan ketatalaksanaan, pemantapan sistem informasi, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraannya.

- c. Dalam rangka pembangunan aparatur kenegaraan, pelaksanaan fungsi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi

negara perlu terus ditingkatkan sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 dengan pengembangan kerjasama yang serasi dan terbuka berdasarkan asas kekeluargaan serta didukung sumberdaya yang memadai.

- d. Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian dan keteladanan, serta kesejahteraan aparatnya sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang sebaik – baiknya khususnya dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
- e. Penertiban aparatur pemerintah dilanjutkan dan makin ditingkatkan terutama dalam menegakkan disiplin aparatur pemerintah terutama dalam menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan serta merusak citra dan kewibawaan

- aparatur pemerintah berupa kolusi, korupsi dan nepotisme, keborosan serta pemborosan keuangan negara.
- f. Pembinaan kepegawaian diarahkan pada makin terwujudnya pegawai negara yang mantap, dengan pengembangan karir berdasarkan prestasi kerja, kemampuan profesional, keahlian dan keterampilan serta kemantapan sikap mental aparat berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 terus ditingkatkan secara berencana, melalui upaya pendidikan dan pelatihan, penugasan, bimbingan dan konsultasi serta melalui pengembangan motivasi, kode etik dan disiplin kedinasan yang sehat, didukung sistem informasi kepegawaian yang mantap serta dilengkapi pula sistem pemberian penghargaan yang wajar.
- g. Hubungan kerja yang serasi antar aparat pemerintah pusat dan daerah dalam upaya makin mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab terus dikembangkan secara realistis atas dasar asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka mendorong kemajuan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan secara merata di seluruh pelosok tanah air, serta meningkatkan perwujudan Wawasan Nusantara.
- h. Pembangunan aparat pemerintah daerah yang meliputi lembaga, tata kerja dan aparat pemerintah daerah diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang maik efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan seluruh aparat pemerintah daerah. Pendayagunaan aparat pemerintah daerah ditujukan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah peningkatan kualitas sistem administrasi, penyempurnaan ketatalaksanaan, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatnya.
- i. Koordinasi, kerjasama dan kemampuan aparat pemerintah yang bertugas di daerah makin dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi dan efektifitas serta keterpaduan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

j. Pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranan aparatur pemerintah desa dan kelurahan terus lebih ditingkatkan dan dikembangkan sehingga makin mampu, efisien dan efektif dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan dalam melayani, mengayomi, menggerakkan dan menghargai prakarsa dan peran aktif rakyat dalam pembangunan, bersamaan dengan menciptakan kondisi yang lebih

mendorong peningkatan kehidupan dan tanggungjawab masyarakat serta kemampuan kelembagaannya.

Sistem perencanaan dan kemampuan aparatur pemerintah untuk menyusun program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan negara

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Jaya Wijaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui teknik observasi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer, wawancara terhadap informan dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan pokok yang terkait dengan

pertanyaan ini. Selain itu juga dilakukan observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Legislatif Dalam Mekanisme Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Kabupaten Jaya Wijaya

Badan legislatif adalah lembaga yang legislate atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat mempunyai suatu kemauan (Rousseau).

Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan maka ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Tidak semua dewan perwakilan mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat undang-undang. Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat maka dewan perwakilan rakyat menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Hal ini badan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijakan umum itu..

Dengan meningkatnya peranan kepemimpinan badan eksekutif dibidang perundangan dan mundurnya peranan legislative, sebagai badan pembuat undang-undang, maka disamping peranan sebagai badan control ini sangat ditinjolkan peranan edukatifnya, badan legislatif dianggap

sebagai forum kerjasama antara golongan-golongan serta partaio-partai dengan pemerintah, dimana beraneka ragam pendapat diadu dimuka umum. Di pihak lain kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan tindakan serta rencananya.

Melalui media massa pula masyarakat ramai diajak mengikuti persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan nilainya menurut kemampuan masing-masing. Dengan demikian rakyat dididik kearah kewarganegaraan yang standar dan bertanggung jawab dan partisipasi politik dapat dibina.

Dipihak lain bagi anggota badan legislatif terbuka kesempatan bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan perasaan-perasaan dan pandangan-pandangan yang berkembang secara dinamis dan masyarakat ramai. Peranan dan wewenang badan legislatif di Negara-negara demokrasi oleh karena didasari oleh ideology komunis. Lagi pula dalam meneropong kekuasaan dan wewenang badan legislatif perlu diperhatikan peranan partai komunis dalam rangka konstitusionil.

Secara formil badan legislatif Uni Soviet, yaitu Uni Soviet tertinggi

sangat ditonjolkan. Peranan sebagai organ kekuasaan Negara tertinggi yang merupakan perwujudan dari kemauan rakyat yang tunggal, tetapi juga memiliki kekuasaan eksekutif yudikatif. Karena konsentrasi kekuasaan dibidang legislatif system ini disebut pemerintahan majelis.

Diantara fungsi badan legislatif yang paling penting ialah menentukan kebijaksanaan dan membuat undang-undang. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amendemen. Terdapat rancangan undang-undang pemerintahan daerah, yang disusun oleh pemerintah dan hak budget.

Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak control khusus. Di samping itu terdapat banyak badan legislatif yang menyelenggarakan beberapa fungsi lain "mensahkan" perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh badan eksekutif. Perlu dicatat bahwa beberapa badan legislatif antara lain mempunyai wewenang menuntut pejabat untuk mengadili.

Menurut teori yang berlaku, maka tugas utama dari badan legislatif terletak dibidang perundang-undangan. Untuk membahas rancangan undang-undang atau peraturan daerah sering dibentuk panitia-panitia yang berwenang untuk memanggil kepala atau pejabat lainnya untuk diminta keterangan seperlunya. Akan tetapi dewasa ini telah menjadi gejala umum bahwa titik berat di bidang legislatif telah banyak bergeser ketangan badan eksekutif.

Hal ini tidak mengherankan sebab dalam Negara modern, badan eksekutif bertanggungjawab atas peningkatan taraf kehidupan rakyat dan karena itu harus memainkan peranan yang aktif dalam mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Kepemimpinannya tercermin dan perundang-undangan yang dipersiapkannya.

Dalam tugas ini dia dibantu oleh para ahli serta sarana-sarana lainnya dalam masing-masing pemimpin atau anggota-anggotanya yang memang merupakan syarat mutlak untuk merumuskan rancangan undang-undangnya. Keahlian dan anggota-anggotanya terbatas, sekalipun beberapa

anggota badan legislatif dibantu oleh staf administrasi yang baik.

Akan tetapi di bidang keuangan, kekuasaan badan legislatif masih tampak jelas. Rancangan anggaran belanja diajukan ke badan legislatif oleh badan eksekutif, akan tetapi badan legislatif mempunyai hak untuk mengadakan amandemen dan dalam hal ini menentukan beberapa jauh anggaran pemerintah dan dengan demikian seluruh program kegiatan pemerintah dapat disetujui. Jadi badan legislatiflah yang menentukan beberapa dan cara bagaimana uang rakyat dipergunakan.

Dalam Negara dimana badan eksekutif memainkan peranan yang dominan, badan legislatif biasanya tidak akan terlalu banyak mengubah rancangan anggaran belanja, akan tetapi dalam Negara dimana badan legislatif merupakan badan yang kuat, badan legislatif dapat saja mengadakan banyak perubahan, termasuk mengurangi anggaran yang akan dipergunakan. Kongres Amerika Serikat misalnya, akhir-akhir ini sering mengurangi bantuan ekonomi untuk Negara-negara yang sedang berkembang.

Dengan demikian semakin berkurangnya pengaruh badan legislatif,

maka peranannya dibidang pengawasan dan control bertambah menarik perhatian umum. Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif agar supaya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak control yang khusus, seperti hak bertanya interpelasi dan sebagainya.

B. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, atau golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain”.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (1993) menjamin masyarakat dengan sasaran menumbuhkan sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia, dengan mengamanatkan agar pelayananumu, yaitu pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan dengan semakin adil, semakin merata, cepat, tepat, lugas, luwes, lancer, tertib, transparan, serta

dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu Presiden Soeharto juga mengemukakan pandangan bahwa masyarakat Indonesia harus dibangun berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kemanusiaan mendapat tempat yang tinggi dan merupakan unsur-unsur yang sangat penting untuk memelihara semangat dan kekuatan gerak pembangunan.

Masyarakat Kabupaten Jaya Wijaya dikenal sangat heterogen karena wilayah Kabupaten Jaya wijaya adalah wilayah pengembangan sehingga berbagai suku, agama, dan ras datang bermukim dan menjadi penduduk masyarakat Kabupaten Jaya Wijaya.

Selain wilayah pengembangan, wilayah Kabupaten Jaya Wijaya merupakan wilayah pendidikan dan dikenal sebagai masyarakat yang berjiwa sosial dan partisipatif dalam segala hal, terutama dalam pembangunan, sebagaimana terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan cukup tinggi lewat swadaya gotong-royong masyarakat di luar swadaya penunjang Pembangunan Desa.

Dengan kata lain, hasil penarikan contoh yang dilakukan

terhadap 100 orang responden yang memiliki keragaman tertentu. Setelah dianalisis menyatakan bahwa 40 responden merasa baik 50 responden mengatakan cukup dan 10 responden mengatakan kurang puas. Sehingga dari hasil pengamatan tersebut dapatlah diungkapkan bahwa tingkat pelayanan kepada masyarakat di Kantor DPRD Kabupaten Jaya Wijaya belum optimal.

Di balik daripada hal tersebut guna mengemban amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara (1991) sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menambah atau meningkatkan perhatian khusus terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka yang menjadi tantangan dan perlu dihadapi atau masalah pokok yang harus mendapat penanganan serius adalah “bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat?”

Jalan utama yang harus ditempuh adalah meningkatkan kualitas aparatur pemerintah baik lewat pendidikan, pelatihan, penugasan, bimbingan, konsultasi, dan pembinaan-pembinaan lainnya, karena perhatian khusus tersebut seperti yang diamanatkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (1993) dapat diberikan bila

kualitas aparatur meningkat. Perlu diperhatikan pula penggunaan manajemen yang modern serta penerapan teknik-tekniknya dalam rangka pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

C Faktor-Faktor Yang Berpengaruh pada Kepemimpinan Legislatif

Dalam menentukan keberhasilan kepemimpinan legislatif sebagai pola penuntun anggota dan yang paling erat dekat dengan fraksi, komisi bahkan masyarakat atau rakyatnya, maka perlu memperhatikan beberapa faktor antar lain : faktor-faktor pendukung yang berpengaruh para kepemimpinan legislatif dalam mengarahkan bekerja sama dengan masyarakat untuk melaksanakan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Jaya Wijaya. Disamping itu juga terdapat faktor-faktor penghambat konflik yang berpengaruh pada ketua/kemimpinan legislatif dalam berpartisipasi kepada bawahan di Kabupaten Jaya Wijaya untuk melaksanakan kinerja.

Faktor-faktor pendukung yang berpengaruh pada kepemimpinan legislatif dalam menggerakkan berpartisipasi anggota-anggota legislatif. Adapun faktor-faktor

pendukung yang berpengaruh pada kepemimpinan legislatif dalam kinerja berpartisipasi anggota-anggota dan komisi-komisi atau fraksi-fraksi antara lain:

a. Faktor Kepercayaan

Yaitu sesuatu yang menimbulkan keseimbangan jiwa dan pikiran yang pada akhirnya menimbulkan semangat optimisme dalam rangka penyampaian tujuan, sifat ini besar sekali pengaruhnya terhadap pengikut dalam hal ini perangkat keseluruhan, terlebih pada masyarakat umum kepercayaan pada diri sendiri bagi seorang pemimpin sangat penting dalam pengambilan keputusan serta kestabilan pribadi.

Agar mengetahui persoalan pribadi baik itu intern maupun secara eksteren, seorang kepala atau ketua legislatif harus memiliki pengetahuan yang luas dan merangkaikan satu hal dengan hal yang lain.

Berhasil tidaknya kepemimpinan peranan legislatif tergantung pada salah satu sifat kepercayaan ini baik kepercayaan pada diri sendiri dan yang terpenting kepercayaan masyarakat, dimana tingkat kepercayaan pada diri sendiri niscaya akan berpengaruh dalam

kepercayaan masyarakat. Dalam upaya menggerakkan partisipasi masyarakat, tingkat kepercayaan ini harus selalu melekat dalam diri ketua legislatif atau kepala pemerintahan yang bersangkutan dengan anggota-anggota atau bawahan maupun masyarakat akan patuh dan tunduk pada setiap kebijakan yang diterapkan apabila itu memang demi kepentingan masyarakat dan salah satu hal yang perlu disadari oleh seseorang ketua legislatif.

b. Faktor Hasil Kerja

Setiap organisasi dibentuk atau didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama sejauh mana tujuan organisasi lebih dicapai, perlu dilakukan penilaian melalui evaluasi secara terus menerus terhadap kinerja organisasi atau lembaga pemerintahan.

Hasil ini perlu dilakukan karena dengan melakukan perbaikan atau peningkatan di tahun-tahun berikutnya, sarana penilaian kinerja dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dari suatu organisasi melalui hasil kerja seorang pemimpin dalam organisasi atau lembaga bahkan mengurus organisasi tersebut.

Faktor ini merupakan bagian dari kinerja legislatif dalam menentukan

berhasil tidaknya ia menyelesaikan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan, pembangunan masyarakat. Dalam setiap organisasi faktor ini menjadi penentu, apakah seseorang mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya atau yang dibebankan kepadanya ataupun sebaliknya karena hasil kerja seseorang mencerminkan pola kedisiplinan, profesionalisme dan kualitas yang perlu terus dikembangkan agar tercipta, sesuatu kepuasan kerja maka hasil kerja seseorang dapat menjadi tolok ukur dapat memperoleh penghargaan atau prestasi kerja yang cukup membanggakan.

Faktor-faktor yang menghambat peranan mekanisme pada kepemimpinan legislatif dalam pemerintahan. Disamping faktor-faktor pendukung kepemimpinan legislatif dalam partisipasi anggota komisi dan fraksi yang sudah dijelaskan faktor-faktor penghambat kepemimpinan legislatif dalam menggerakkan kerjasama anggota komisi-komisi dan fraksi-fraksi antara lain:

a. Adanya sebagian kecil anggota kurang mengerti tentang mekanisme pembangunan sesuai dengan pengertian pembangunan sebagai salah suatu proses

pertumbuhan dan perbaikan di berbagai segi kehidupan manusia. Masyarakat kurang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dirinya ditengah-tengah masyarakat kurang pemberdayaannya, sehingga sebagian kecil masyarakat bersikap pasrah pada keadaan, tanpa harus berusaha merubahnya atau melakukan peningkatan taraf hidupnya.

- b. Faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada belum mampu digunakan secara optimal. Manusia sebagai subjek pembangunan dan potensi bagi pelaksanaan pembangunan tentunya menjadi modal agar tujuan yang dicita-citakan bisa tercapai. Sebagai potensi pembangunan maka perlu ditingkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam mengolah sumberdaya alam sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Tetapi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa faktor sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan dua hal yang bertalinan ibarat akar dan rumput yang saling

menguatkan satu dengan yang lainnya.

Sedangkan indicator kegagalan legislatif dalam menggerakkan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan antara lain kurangnya kerjasama antara ketua dan anggota-anggota, sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap pembangunan di kabupaten sendiri yaitu di Kabupaten Jaya Wijaya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan lembaga legislatif Kabupaten Jaya Wijaya dalam mekanisme pemerintah daerah merupakan posisi penting karena sebagai muara dari berbagai kebijaksanaan pemerintah maupun daerah tingkat atasnya, dan sebagai pelayan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah Kabupaten adalah pendukung utama dalam pelaksanaan otonomi pada daerah Kabupaten/ Kota.

Upaya pemberdayaan aparatur pemerintah lewat pendidikan-pendidikan dan pelatihan-pelatihan sangat perlu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya serta meningkatkan kuliatas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional harus dibangun agar menjadi sumber daya manusia yang potensial dan produktif, antara lain dengan jalan menjamin pelayanan umum kepada masyarakat yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi W. Buchari, M.Si. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Sulawesi Utara* Progress Press.2001
- Bambang Yudiyono Drs, M.Si. *Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta 2001.
- Deddy Supriadi Bratakusumah, PhD, Dadang Solihim MA. *Penyelenggaraan Otonomi Pemerintahan Daerah*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 2004.
- Siagian, P. Sondang, 1993, *Organisasi dan Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Wiliam J. Goode, Sosiologi Keluarga, Jakarta 2002
- Sutarto, 1995, *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sutarto, 1995, *Dasar-dasar Organisasi*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Thoha Mitfa, 1995, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yulk Gary, 1998, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Prenhalindo, Jakarta.
- Aditama Bandung.
- Inu Kencana Syafie, 2003 *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Refika Aditama Bandung.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah* Rineke Cipta 1992.
- Musnaef, Drs. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Haji Masagun, Jakarta 1989
- Musnaef, Drs. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. CV. H. Masagung Jakarta 1983.
- Sumber-Sumber Lain ;
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.